

beranda profil **PERKAWAN** INFORMASI PRODUK PENGADUAN TESTIMONI PENGADAAN BARANG JASA KONTAK

Coronata (GOTRAK) – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Gorontalo mengadukan 8 keluhan masyarakat mengenai dampak penyebaran penyakit Asia pada di Kota Gorontalo akibat penyebaran penyakit demam berdarah.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo, Ali S. Nede di Gorontalo, Kamis, mengungkapkan, pihaknya mengadukan Pemerintah Kota Gorontalo dalam hal ini pihak Dinas PUPTI untuk memastikan lingkungan terdampak.

Meskipun Ali S. Nede, sebagai ketua yang mewakili Ombudsman akan berupaya melakukan koordinasi antara pihak di lapangan dengan masyarakat pengguna jasa terkait penyebaran penyakit.

"Hal ini bertujuan terjadinya koordinasi terhadap pengarsipan permasalahan, serta mencari solusi antara masyarakat dengan pihak penyedia jasa," ujarnya.

Meskipun Ali, itu yang menjadi prioritas adalah pengarsipan data agar jasa yang tidak terakreditasi dan tidak memenuhi standar.

"Untuk pengarsipan dan koordinasi yang baik antara pihak penyedia dengan masyarakat pengguna jasa dan kami akan saling membantu," lanjut Ali.

Dalam pertemuan di pihak Dinas PUPTI di Gedung Koperasi Bina Warga, Alian Abdulah salah seorang koordinator Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo dan diterima langsung oleh Kepala Perwakilan Ali S. Nede bersama Alian Bina Warga Perwakilan dari Perwakilan Lapangan, Alian Fardiansyah.

Dalam kesempatan itu, pihak Dinas PUPTI menyampaikan permasalahan infrastruktur dan koordinasi dengan baik ke pihak penyedia yang terkait dengan pengarsipan dan pengarsipan pelayanan sebelum itu, baik di masa pandemi maupun di masa sebelum 20 Januari Kota Gorontalo.

Pihak PUPTI yang menjadi pengarsip pelayanan ini akan melakukan evaluasi kepada penyedia jasa dan pelayanan di lapangan agar kedepannya dapat melaksanakan tugas dan pelayanan dengan baik termasuk aspek pelayanan publiknya agar tidak terganggu.

Kabar Ombudsman

Ombudsman RI Terima Kelengkapan Meman Perbaikan, Sahas Pen...

Artikel Terbaru

Selamat datang, adakah yang dapat kami bantu?

Ombudsman Berharap Pelayanan Publik Kembali Normal Pasca...

beranda profil **PERKAWAN** INFORMASI PRODUK PENGADUAN TESTIMONI PENGADAAN BARANG JASA KONTAK

Mengingat hal tersebut, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo Ali Nede selaku Apden Peneliti Laporan Aspek Publikasi menyampaikan adanya soal tersebut. Kata Alian, pihaknya sudah melakukan rapat penyempitan laporan pemberitahuan pengarsip data di Kujang.

"Kami telah menerima surat tersebut dari Ombudsman RI mengenai permasalahan tidak dapat penyempitan laporan pemberitahuan pengarsip data yang ada di Kabupaten Gorontalo. Di waktu yang sama, kami juga menerima perintah Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk melakukan koordinasi kembali," Kata Alian, selaku Ombudsman Perwakilan Gorontalo, Pada Senin (16/1/2023).

"Ombudsman juga telah melakukan rapat koordinasi dengan perwakilan pemerintah dan instansi terkait, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) beserta Kepala Kujang Kabupaten Gorontalo. Dalam pertemuan tersebut, kami membahas solusi-solusi terkait permasalahan pemberitahuan pengarsip data tersebut. Pada dasarnya, permasalahan tersebut berkaitan koordinasi dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo bahwa akan mengarsipkan pengarsip data yang akan diberikan sesuai jabatan yang ditugaskan untuk urusan ini secara resmi," lanjut Alian.

Asisten Peneliti Laporan Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo, Alian Fardiansyah.

Alian menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Gorontalo sudah memberikan informasi bahwa sudah melakukan pengarsipkan kurang lebih 40 pengarsip data.

"Hingga saat ini kami telah mengarsipkan permasalahan tersebut, namun sebagai informasi yang kami sampaikan kembali ke Ombudsman Gorontalo, yang mana mereka telah melakukan pengarsipkan kurang lebih 40 pengarsip data. Sedangkan surat dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo dari 40 pengarsip data yang ditugaskan, ada 3 orang yang telah mengarsipkan data, sehingga total ada 3 orang yang sudah ditugaskan," lanjut Alian.

"Dari total 170 pengarsip data yang ditugaskan, sudah ada 40 pengarsip data yang ditugaskan. Sedangkan kata Alian, untuk yang 130 orang lainnya, Pemerintah Kabupaten Gorontalo sedang mempersiapkan pengarsipkan untuk pengarsipkan. Adapun apa-apa yang mereka siapkan, sudah akan dilakukan penugasan dengan pihak-pihak terkait di wilayah Pemerintah Kabupaten Gorontalo," lanjut Alian.

Selanjutnya, Alian juga mengungkapkan bahwa secara umum bahwa ada koordinasi Ombudsman RI yang telah...

Artikel Terpopuler

Wikipedia dan keberlangsungan...

Artikel Terbaru

Selamat datang, adakah yang dapat kami bantu?

Kabar Ombudsman

Ombudsman RI Terima Kelengkapan Meman Perbaikan, Sahas Pen...

Ombudsman tegaskan urgensi wikipedia dan keberlangsungan...

Ombudsman RI Selamat datang, adakah yang dapat kami bantu?

Ombudsman Mengeluarkan 80 Ribu...

READID - Perhelatan akbar Pemilu 2024 masih seribling jauh, namun berbagai manuver dan deklarasi beberapa figur yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden sudah mulai ramai. Tentu, berbagai manuver kandidat calon presiden yang sedang bertenggang saat ini merupakan sesuatu yang menarik dalam dunia politik kita.

Dalam berbagai survei muncul beberapa nama yang digadang-gadang bakal menjadi calon presiden. Sebut saja Anies Baswedan, Puan Maharani, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Nirranga Hartono, dan Agus Harimurti Yudhoyono.

Munculnya nama-nama kandidat calon presiden tersebut bisa menjadi referensi bagi masyarakat dalam menentukan siapa pemimpin yang pantas menggantikan Joko Widodo pada 2024 mendatang. Dalam hal ini, masyarakat diharapkan selektif dalam memilih pemimpin. Artinya, jangan sekadar memilih berdasarkan popularitas dan elektabilitas semata, tetapi juga memiliki integritas dan kualitas.

Proses penyelenggaraan pemilu akan sesuai kebermanfaatan ketika dilaksanakan dengan penuh integritas sehingga hasilnya pun mendapatkan legitimasi dari

Untuk melihat lebih detail kondisi pelayanan antrian online di RSUD Polewali, tim Ombudsman RI Sulawesi Barat melakukan monitoring. (21/11/19)



Kepala Asisten Pemeriksa Laporan Ombudsman RI Sulbar, Azhary Fardiansyah mengatakan, secara umum kondisi pelayanan di RSUD Polewali sudah berjalan dengan baik, meski tim Ombudsman masih mencatat keluhan yang disampaikan oleh warga khususnya soal layanan antrian online.

"Kondisi yang sempat kita lihat hari ini pelayanan sudah berjalan dengan baik, meskipun kita juga akui bahwa masih ada keluhan dari warga, sehingga kita lakukan monitoring sebagai bentuk energi dan komitmen bersama dalam mendukung perbaikan layanan publik," tutur Azhary.

Secara kelembagaan Ombudsman RI mengimbau dan berharap kepada semua unit penyelenggara pelayanan publik termasuk RSUD Polewali, tetap memperhatikan dan memperbaiki layanan pengaduan internal sehingga akses yang bisa selasai secara internal tidak perlu lanjut ke layanan pengaduan Kantor Ombudsman RI Sulbar.

"Kepada semua pengaduan internal ini tidak bisa diabaikan, mulai dari keterlambatan waktu serta sampai pejabat pengaduan internal harus dipukul di masing-masing instansi, sehingga keluhan yang disampaikan publik mendapat perhatian dan tidak berlalu begitu saja," Pungkas Azhary. (slvrf)

Untuk melihat lebih detail kondisi pelayanan antrian online di RSUD Polewali, tim Ombudsman RI Sulawesi Barat melakukan monitoring. (21/11/19)



Kepala Asisten Pemeriksa Laporan Ombudsman RI Sulbar, Azhary Fardiansyah, mengatakan pihaknya telah melayangkan undangan klarifikasi kepada terlapor namun tidak hadir.

Tim Ombudsman, kata dia, juga sudah memberi kesempatan kepada Kepala SMAN 1 Matangnga untuk memberikan klarifikasi via telepon namun tidak digubris.

"Beberapa cara sudah kami upayakan, namun tidak membuahkan hasil. Atas dasar itu secara kelembagaan kami akan kembali melayangkan undangan klarifikasi sebelum melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk menghadirkan yang bersangkutan secara paksa," kata Azhary, Rabu (20/11).

Dikatakan, sebagai lembaga negara pengawas penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan UU Ombudsman dan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Ombudsman menjadi pusat pengaduan masyarakat terkait kualitas pelayanan publik yang buruk dan tindakan maladministrasi.




7 Maret 2022 Penerimaan Indeks Berita Skema

berita - jawa timur - jawa tengah - nasional - politik - pendidikan - olahraga - kesehatan - hiburan

Ombudsman Provinsi Gorontalo, melalui aduan dari sejumlah Orang Tua Siswa (Calon Siswa) yang merasa dirugikan dan keberatan atas Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo.

Perselisihan yang melibatkan orang tua siswa tersebut dikaji Azhary Fardiansyah, seorang penyidik Ombudsman Provinsi Gorontalo.

"Aduan dan keluhanannya antara lain para orang tua siswa merasa, seharusnya anak mereka dapat diterima di sekolah pada pilihan pertama yang mereka pilih saat mendaftar melalui web GRHM dengan jalur zonasi..."

"Namun ternyata hasilnya mereka tidak lulus, selain itu mereka juga mengeluhkan tidak adanya keterbukaan data dan informasi dari penyelenggara, terkait jarak zonasi untuk membandingkan yang lulus dan yang tidak lulus dari sisi jarak zonasi itu," ujarnya.

Langkah yang akan dilakukan Ombudsman Provinsi Gorontalo sendiri, yakni melakukan verifikasi kelengkapan surat formil dan materinya.

"Namun karena permasalahan PPOB ini masuk dalam kategori laporan yang dapat di RCO (Respon Cepat Ombudsman), tentunya dalam waktu dekat ini tim akan turun untuk menindaklanjuti laporan tersebut setelah memperoleh disposisi dari Kepala Perwakilan."

Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp

Politik

Idah Syahid - KPNP
Menteri Pung
Menteri Energi
Dalam Penanganan
Pantai

News Viral Tokoh Berkehidupan Hiburan Tabak Olahraga Olahraga Kesehatan Teknologi Lainnya

Umumisasi reputasi etasosiasi (umr) Perwakilan Gorontalo, akan membuka gerai pengaduan dan konsultasi **pelayanan publik**. Masyarakat dapat memanfaatkan gerai untuk melapor. Anggota Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo, **Azhary Fardiansyah** mengatakan, gerai akan dibuka di kantor DPM PTSP Gorontalo Utara. Masyarakat kata dia, bisa melapor atau dugaan maladministrasi **pelayanan publik**. "Masyarakat juga dapat berkonsultasi soal **pelayanan publik** secara umum kepada anggota Ombudsman," kata Azhary, Minggu (21/3/2021). Dia berharap, gerai pengaduan dapat dimanfaatkan masyarakat Gorontalo Utara, agar aspirasi masyarakat terkait **pelayanan publik** lebih meningkat, dan **pelayanan publik** di Gorontalo Utara lebih baik lagi. Berdasarkan pengaduan tersebut akan diadakan hanya akan dibuka pada Selasa, (23/3/2021). Masyarakat yang akan melapor kata Azhary, agar membawa KTP, surat kuasa jika pelapor dikuasakan, kronologi laporan, harapan pelapor. Pastikan kata dia, pelapor telah berupaya mengadu ke instansi terlapor, namun tidak memperoleh penyelesaian. Pastikan juga, laporan ke Ombudsman ini, tidak sedang menjadi objek pemeriksaan.

Barat yang ditayangkan oleh Google

Anggota DPR RI ikut Pelaksanaan Dasar Darah Bess by Campus di UEM

HUT ke 295 Tahun Kota Gorontalo, Menteri: Konsisten Menuju Masyarakat...

Sepatu Kulit Pekerja Kantoran

Menjadi produsen FxPro

Trading dengan leverage yang lebih tinggi

BERANDA NEWS DAERAH NASIONAL LIFESTYLE MULTIMEDIA GORONTALO LITERASI

Baca Juga : [Ada 2744 Kasus Kurban Diwewethir di Kabupaten Gorontalo](#)

Direktur RSUD Aloni Saboe, dr.Andang Ito, Direktur RSUD Bumi Panua Pohuwato dr.Syahrawani, PLT. Kadis Kesehatan Prok.Gorontalo Miranda, dan beberapa OPD lingkup Pemrov Gorontalo.

Penanggung jawab kegiatan, Achary Fardiansyah, menuturkan kegiatan ini dilaksanakan guna membahas isu-isu yang sering menjadi keluhan masyarakat. Khususnya selama masa Pandemi Covid-19. Di antaranya masalah Jaring Pengaman Sosial (JPS), Pelayanan Kesehatan, Keuangan, Transportasi dan Keamanan.

"Melalui kegiatan ini Ombudsman Gorontalo bersama OPD lingkup Pemrov Gorontalo dan instansi vertikal di Provinsi Gorontalo dapat bekerja kolaborasi guna menyelesaikan keluhan-keluhan masyarakat yang ada. Dengan begitu masyarakat akan merasa tenang dalam menghadapi situasi pandemi ini. Terkhusus menghadapi masa PSBB di Gorontalo yang akan diperpanjang oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo," tutur Achary.

Baca Juga : [Warga Antusias Ikut Gelar Vekalnasi Sembuh TUBT RI Ke-ET di Pabrik Gorontalo](#)

Ia menyampaikan apresiasi kepada kepala OPD dan instansi vertikal yang berkesempatan untuk mengikuti kegiatan ini di tengah kesibukan masing-masing.

Penyerahan Modal Rp2.2 M Seret Dua Direktur RSUD Kabupaten Gorontalo ke Bul

01

02 Geger Hujan Di Di Bata, Im Pengekasan BMKG Kurus Jaraknya Gorontalo

03 Peternak Kambing Pindah Berasidair, Cegah Dili Desa Kibuk LU Garanti

04 Viral Gendang Ramek Berghutan Sampai Bonting Gegera Sosial Sistem

05 Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad Komiteri Kembangkan Kegiatan Panyan Gorontalo

Salwa, 07 Maret 2020 | Info Salwa

Carri Berita

Zenawi.com, Mamuju | Tim Ombudsman Ombudsman RI Sulawesi Barat, melakukan rapat persiapan dalam rangka tindak lanjut sejumlah pengaduan masyarakat yang dilaporkan ke kantor Ombudsman RI Sulawesi Barat.

Proses penyelesaian 8 pengaduan oleh tim Ombudsman dalam pekan ini, sangat bervariasi dan lokasinya berbeda-beda kabupaten sehingga tim harus melakukan pertemuan lebih mendalam. Hal itu dilakukan karena keterbatasan personil teritorial anggaran, (14/02/19).

Achary Fardiansyah, SH selaku Kepala koordinator pemeriksaan laporan Ombudsman RI Sulbar, yang memimpin rapat tersebut mengatakan, koordinasi ini penting untuk membuka gelar laporan dengan semua tim untuk melakukan penelitian. Karena setiap pengaduan butuh penanganan yang berbeda-beda, tidak semua harus melalui mekanisme investigasi lapangan.

Menurut Achary tindakan Maladministrasi yang berdampak sistemik harus di prioritaskan, misalnya pengaduan soal Pilkada Desa Gandang Dewata dan Desa Timoro Kabupaten Mamasa yang mendadak dihentikan dengan himbauan Wakil Bupati Kals: Mamasa.

"Karena jarak dan keterbatasan anggaran sehingga setiap proses tindak lanjut yang kami lakukan harus efektif dan efisien, agar penyelesaian pengaduan juga berkualitas kami selalu lakukan pemetaan melalui gelar laporan," jelas Achary.

Dari hasil rapat diatas telah disimpulkan beberapa laporan yang akan ditindaklanjuti dalam mekanisme investigasi lapangan atau pemeriksaan langsung. "Sementara

Sulbar

Pembelahan Bakul Calon Anggota KPU Kabupaten Mamuju, Mamuju..

Akan TB Menerimaan PJ Gubernur Sulbar Ahmad Malik..

Perfeksikan menyikut peminisr santiaf Ayu Mahdi..

ST PMS Kardi Kewasudkan Sulbar Nati Penaklukan Tati..

Perfeksikan Menyikut Batah Mujakan Sulbar WBS, Bulak..

Paparan

Manuju, Katinting.com – Menindaklanjuti sejumlah aduan masyarakat, tim Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat untuk penyelesaian sejumlah kasus maladministrasi yang diterima dalam pekan ini.

Pekan ini tercatat ada 5 kasus yang sedang dalam proses penyelesaian diantaranya terkait penghentian proses Pilkada di Desa Gandang Dewata dan Desa Timans, Kabupaten Mamasa oleh wakil Bupati Mamasa, kemudian melakukan monitoring laporan terkait SPJS di Kabupaten Majene, sementara sejumlah kasus lainnya menurut tim Ombudsman Sulbar belum bisa diberikan karena masih menjadi mystery shopping.

Kota Achary Fardiansyah, SH selaku Kepala koordinasi pemerintahan lapangan Ombudsman RI Sulbar, sebelumnya kami tdk bisa sampaikan lebih detail karena menggunakan metode investigasi tertutup, nanti hasilnya akan disampaikan sepulang dari kegiatan investigasi.

Kasus yang diangkat pun bentuknya variatif dan lokasinya berbeda-beda Kabupaten. Sehingga menurut Ombudsman melakukan pemetaan lebih mendalam. Hal itu dilakukan karena keterbatasan personil termasuk anggaran.

Lanjut Achary Fardiansyah SH, mengatakan, koordinasi ini penting untuk melakukan gelar laporan dengan semua tim untuk melakukan penitatan. Karena setiap pengaduan butuh penanganan yang berbeda-beda, tidak semua harus melalui mekanisme investigasi lapangan.

Menurut Achary tindakan Maladministrasi yang berdampak sistemik harus di prioritaskan,

Koneng Pasangkaya
Mendukung Yoh Pujay dan
Cade Jansah
3 March 2022

AAL Tsat idan Warga sul
Latas PT Pasangkaya
3 March 2022

Grat yang Diemutai Warga
Desa Lulo Sukamaja, Mamasa
Mash Alif
3 March 2022

Kohli Yosia Akas Panggi
Hakik Tokat Kuyulahan
Peruntaka Pema
3 March 2022

Ressi, Partai Demokrat Cabang
Anas Ganyutan Galat Cade
Presiden 2024
3 March 2022

Borlandi ka DPP Partai
Demokrat Anas, BSA APY, KGA
Bap Dersana sara
3 March 2022

S Soling ASOS TIRDA PIRAL
3 March 2022

Sebagaimana diketahui dalam laporannya Repolis selaku pelopor, merasa dirugikan karena telah memiliki berdasarkan serikat yang dimiliki, diklat oleh Perintis Mamuju sebagai aset daerah dan digunakan sebagai lahan pembangunan Puskesmas Rangas.

Menyikapi hal tersebut, Asisten Ombudsman RI Sulawesi Barat Achary Fardiansyah, mengimbau telah menyinkronkan pelapor untuk melakukan gugatannya ke tingkat Pengadilan Negeri, jika para pihak tetap bertahan dengan pendiriannya.

"Kami hanya mengupayakan penyelesaian non litigasi sesuai dengan kewenangan kami di Ombudsman RI, jika mereka tetap ngotot dengan pendirian masing-masing kami pertimbangkan menaruh penyelesaian melalui jalur hukum," ucap Achary Fardiansyah.

Selain itu ditempati yang sama, Johenis Sabar Panggala Kepala seksi pengkaji BPK Kabupaten Mamuju, untuk mendukung langkah ORI Sulawesi Barat, ia juga meminta Repolis selaku pelopor dan pihak Perintis, agar segera menyampaikan permohonan pengikutan pengembalian barang, ia juga mengingatkan agar prosesnya nanti dikawal oleh kepolisian untuk menghindari potensi konflik.

KOMUNITAS SEMBILAN
Saling Bantu dan Saling Jaya
POLMAN
"Saling Bantu dan Saling Jaya"
Saling Bantu dan Saling Jaya
Saling Bantu dan Saling Jaya

Wika Mulus
Uporné.com

Sepatu Kulit Pekerja Kantoran
Pesan Se...

Tim Ombudsman RI melakukan investigasi kearah dugaan maladministrasi terkait maladministrasi dan penyimpangan prosedur penggunaan serta pengelolaan anggaran dana desa dan alokasi dana Desa Uluamate, Kecamatan Kakuku, Kabupaten Mamuju. Dari hasil kajian dan investigasi itu, Tim Ombudsman RI Sulbar melayangkan surat resmi berupa saran kepada Bupati Mamuju untuk proses tindak lanjut.

Alasannya itu, pada pertemuan Tim Ombudsman RI Sulbar dengan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju beberapa waktu lalu, Bupati H. Hefzi Wahid menyampaikan jika pihak Pemkab Mamuju telah melakukan tindak lanjut dengan menurunkan tim audit dan inspektorat.

Hasilnya, Tim Inspektorat Kabupaten Mamuju tersebut diturunkan untuk melakukan proses tindak lanjut atas temuan Tim Ombudsman RI Sulbar di Desa Uluamate, Kecamatan Kakuku.

Namun lanjutnya, hingga kini pihaknya belum menerima laporan resmi hasil audit Inspektorat Kabupaten Mamuju terhadap penyimpangan prosedur anggaran Desa Uluamate tahun 2015-2016 itu.

Sementara, Asisten Ombudsman RI Sulbar, Azhan Fardiansyah, menjelaskan update data Tim Ombudsman RI Sulbar terkait kondisi pelayanan administrasi di kantor Desa Uluamate. Kata dia, hingga kini pelayanan masih lumpuh total.

"Kondisi tersebut sudah berlangsung sejak Tim Ombudsman menerima pengaduan masyarakat, bahkan setelah melayangkan saran perbaikan kepada Bupati Mamuju Maret 2017 lalu hingga hari ini kondisi di lapangan masih sama," ungkap Azhan.

Dikatakan Azhan lebih lanjut, akibat kondisi pelayanan yang lumpuh, warga kesulitan melakukan pengesahan sebagai saksi proses terhadap tindakan kepala desanya.

nasabah yang ingin melakukan pelunasan harus membuat permohonan secara tertulis sebelum-lambatnya 10 hari kerja sebelum tanggal permohonan pelunasan yang diajukan.

Pihak BRI KCP Wonorejo, juga mengakui tidak ada unsur kesengajaan menghambat proses pelunasan utang Nasabah.

Setelah melakukan klarifikasi Tim RCO Ombudsman meminta agar setiap pihak perbankan memberikan akses informasi publik secara detail kepada setiap nasabah baik terkait pinjaman termasuk simpanannya utamanya di Bank BRI.

"Kami melihat bahwa setiap ada dugaan tidak kompeten, sehingga kami sarankan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah harus diarahkan dan dituntun sesuai aturan, sehingga meminimalkan kesan negatif dari Nasabah ini kami sampaikan kepada semua Bank utamanya Bank BRI KCP Wonorejo," Terang Asisten Ombudsman RI Sulbar Azhan Fardiansyah.

Selain itu, Tim RCO Ombudsman juga mengimbau setiap Nasabah selaku pengguna layanan publik agar mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang telah diatur agar semua proses di perbankan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Ombudsman RI Sulbar

Pasangkayu ngaguk warga ummatu Manfaatkan Lahen Yang Ada.
Bye 2019-08-08

Ratusan Anak Muda Berebut Untuk Dapat Berfoto Dengan AHY
Bye 2019-08-08

AHY & Annisa Pohan Temui Para Influencer Dan Tiktokers
Bye 2019-08-08

GORONTALO – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Gorontalo, melakukan upaya jemput bola dengan membuka gerai pengaduan di Kabupaten Gorontalo Utara.

"Gerai pengaduan dan konsultasi pelayanan publik ini, kami tempatkan di kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), yang akan dibuka mulai Selasa, 23 Maret 2021," kata Asisten Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman Gorontalo, Azhary Fardiansyah, di Gorontalo, Minggu (21/3/2021).


Azhary, asbten Ombudsman terbaik di Indonesia Timur ini mengatakan, upaya jemput bola harus dilakukan mengingat minimnya aspirasi terkait pelayanan publik dari Gorontalo Utara.

Sepanjang tahun 2020, hanya ada 5 aduan yang dilaporkan, sementara tahun 2021 baru 1 aduan dan sementara dalam tahap verifikasi.


Olehnya kata dia, gerai tersebut merupakan upaya untuk mendekatkan akses sekaligus mengedukasi masyarakat terkait tugas dan fungsi Ombudsman RI sebagai wadah pengaduan penyelenggaraan pelayanan publik.

Ia mengatakan pengaduan juga menjangkau soal pelayanan pertanahan, administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

"Masyarakat diharapkan dapat optimal memanfaatkan gerai tersebut untuk menyampaikan laporannya kepada Ombudsman atas adanya dugaan maladministrasi pelayanan publik. Juga dapat berkonsultasi kepada kami terkait pelayanan publik secara umum," katanya pula.




Laki-laki Milik Kewajiban Wajib Berperan Tenggulung...




Sambut Hari Air Sedunia, Puluh Miliaran Berhenti Sembung...



Sambut Ramadhan, Ribuan Guru K33 Depok Skenas Hadel...




Rekrutmen Persewaan Negeri Kudu dan Tjok Lengah



Soeharto Selamat Hari Pembinaan Kemastik, Tapi...

BERITA TERPOPULER



Polisi Sejauh Maksimalnya, Ribuan Pelajar SD Kurangi...

Pemberitaan terkait tugas

1. <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--ombudsman-gorontalo-tindak-lanjuti-keluhan-warga-terkait-penutupan-jalan>
2. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkmedia--soal-pemberhentian-aparat-des-ombudsman-ri-peringati-pemda-kabgor>
3. <https://tribatanews.gorontalo.polri.go.id/40026/ombudsman-apresiasi-promosi-jabatan-kapolsek-terbuka-polda-gorontalo/>
4. <https://read.id/optimalisasi-pengawasan-pemilu-2024/>
5. <https://www.pedulirakyat.co.id/jelang-ramadhan-1443-h-ika-unhas-gorontalo-bahas-kegiatan-amalia/16156/>
6. <https://dikita.id/tim-monitoring-ombudsman-sambangi-rsud-polewali/?print=print>
7. <https://puskominfo-ppdi.or.id/perangkat-des-diberhentikan-oleh-bupati-ombudsman-berikan-evaluasi-ke-pemprop-gorontalo/>
8. <https://kumparan.com/sulbarkini/diduga-potong-dana-bos-ombudsman-panggil-kepala-sekolah-di-polman-1s1ZDXEjSb>
9. <https://habari.id/ppdb-berpolemik-orang-tua-casis-laporkan-dikbudpora-di-ombudsman/>
10. <https://www.hulondalo.id/nasional/pr-9647180121/tak-puas-dengan-pelayanan-publik-ombudsman-gorontalo-buka-gerai-pengaduan>
11. <https://www.cendananews.com/2021/03/ombudsman-buka-gerai-pengaduan-di-gorontalo-utara.html>
12. <https://gopos.id/opd-isntansi-vertikal-diimbau-kolaborasi-atasi-keluhan-masyarakat-di-masa-covid-19/>
13. <https://2enam.com/tim-ombudsman-gelar-rapat-tindaklanjut-pengaduan-publik/>
14. <https://hestek.co.id/2023/01/16/tindak-lanjut-laporan-pemberhentian-aparat-des-ombudsman-ri-warning-pemkab-gorontalo/>
15. <https://katinting.com/ombudsman-sulbar-tindak-lanjuti-semua-aduan-masyarakat/>
16. <https://fajar.co.id/2019/12/11/oknum-pegawai-bpn-tarik-dana-ilegal-dari-warga-yang-urus-sertifikat-akhirnya/>
17. <https://www.masalembo.com/2018/01/bri-unit-bambalamotu-diduga-hilangkan.html>
18. <https://www.tayang9.com/soal-polemik-lahan-pkm-rangas-ori-sulbar-gelar-konsiliasi/>
19. <https://matalensa.id/2017/12/22/diduga-hambat-pelunasan-utang-nasabah-ombudsman-sambangi-bri-kpc-wonomulyo/>
20. <http://www.fokusmetrosulbar.com/2017/07/ombudsman-ungkap-dugaan-maladministrasi.html>